



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 232 dan pasal 294, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab, II pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.

SKPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan (lihat Perbup SOTK masing-masing OPD) Dinas Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO). Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



## **1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk petanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang selama satu periode tahun anggaran 2020.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan tahun Anggaran 2020.

## **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



- m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 );
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang



- Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
- y. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
  - z. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);
  - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2020 Nomor7);
  - bb. Peraturan Bupati Batang Nomor 73 tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 69 );
  - cc. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2020 Nomor 69 );
  - dd. Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2020 Nomor 67);
  - ee. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2020 Nomor 69).
  - ff. Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13 );

### 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2020 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I** Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan



1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

**Bab II** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**Bab III** Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan LRA

3.1.2 Belanja

3.2. Neraca

3.2.1. Aset

3.2.2. Kewajiban

3.2.3. Ekuitas

3.3. . Laporan Operasional

3.3.1. Pendapatan LO

3.3.2. Beban

3.3.3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

3.4.1. Ekuitas Awal

3.4.2. Surplus / Defisit LO

3.4.3. Koreksi Kesalahan Mendasar

3.4.4. Ekuitas Akhir

**Bab IV** Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

**Bab V** Penutup.



## **BAB II** **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

### **1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

**REALISASI PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAHAN  
BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN  
SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2020**

NO REK	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	
				(Rp)	(%)
1	WAJIB	,-	,-	,-	
2	PILIHAN	,-	,-	,-	
	JUMLAH				

**REALISASI BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN  
BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN  
SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN KAB. BATANG  
TAHUN 2020**

NO REK	NAMA SATKER	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
01	URUSAN WAJIB	5.389.468.667,00	4.972.446.905,00	417.021.762,00	92,26
02	URUSAN PILIHAN				
	JUMLAH	5.389.468.667,00	4.972.446.905,00	417.021.762,00	92,26

### **2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

#### **a. Belanja**

Belanja tidak terserap ( yang realisasinya dibawah 90%) disebabkan karena :

- 1) Belanja Pengadaan Tanah Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor realisasi sebesar 65,57 % dikarenakan penawaran lelang yang rendah.



### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan - LRA dan Belanja.

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

##### 1) Belanja

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	selisih (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	4.349.468.667,00	4.285.321.409,00	64.147.258,00	98,53
2	BELANJA MODAL	1.040.000.000,00	687.125.496,00	352.874.504,00	66,07
	JUMLAH	5.389.468.667,00	4.972.446.905,00	417.021.762,00	92,26

Berdasarkan rincian di atas dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2020 lebih rendah Rp 417.021.762,- atau 7,74%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 maka realisasi belanja tahun 2020 turun sebesar Rp 372.890.259,- atau 6,82 %. Perbandingan realisasi belanja SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang Tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

		2020		2019	
NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	4.349.468.667,00	4.285.321.409,00	4.174.821.760,00	102,647
2	Belanja Modal	1.040.000.000,00	687.125.496,00	564.980.000,00	121,619
	JUMLAH	5.389.468.667,00	4.972.446.905,00	4.739.801.760,00	104,908





Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja

**a) BELANJA OPERASI**

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja operasi SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Belanja Operasi:</b>			
Belanja Pegawai	2.902.530.943,00	2.860.756.818,00	2.103.624.138,00
Belanja Barang	1.446.937.724,00	1.424.564.591,00	2.071.197.622,00
	4.349.468.667,00	4.285.321.409,00	4.174.821.760,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2020 lebih rendah Rp 64.147.258,- atau 1,47%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, realisasi belanja operasi Tahun 2020 lebih besar Rp 110.499.649,- atau 2,58 %.

**(1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

<b>Belanja Pegawai:</b>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
<b>Belanja Tidak Langsung:</b>					
Gaji dan Tunjangan	1.338.974.381,00	1.318.330.256,00	98,46	(20.644.125,00)	(1,54)
Tambahan Penghasilan PNS	648.806.562,00	637.706.562,00	98,29	(11.100.000,00)	(1,71)
	1.987.780.943,00	1.956.036.818,00	98,40	(31.744.125,00)	(1,60)
<b>Belanja Langsung:</b>					
Honorarium PNS	44.750.000,00	44.750.000,00	100,00	-	-
Honorarium Non PNS	870.000.000,00	859.970.000,00	98,85	(10.030.000,00)	(1,15)
Uang Lembur	-	-	-	-	-
Belanja pegawai BLUD	-	-	-	-	-
	914.750.000,00	904.720.000,00	98,90	(10.030.000,00)	(1,10)
	2.902.530.943,00	2.860.756.818,00	98,56	(41.774.125,00)	(1,44)



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2020 sebesar Rp. 2.860.756.818,- ( 98,56 % ) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 41.774.125,- (1,44 %). Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 1.956.086.818,- diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak daerah.

Realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 904.720.000,- diantaranya dalam bentuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim dan honorarium tenaga ahli.



Pemerintah Kabupaten Batang  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

**(2) Belanja Barang**

Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Belanja Bahan Pakai Habis	87.058.600,00	87.037.300,00	99,98	(21.300,00)	(0,02)
Belanja Bahan/Material	53.325.600,00	53.325.600,00	100,00	-	-
Belanja Jasa Kantor	681.460.000,00	667.081.817,00	97,89	(14.378.183,00)	(2,11)
Belanja Premi Asuransi			-	-	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93.760.000,00	91.915.250,00	98,03	(1.844.750,00)	(1,97)
Belanja Cetak Dan Penggandaan	40.235.500,00	40.225.300,00	99,97	(10.200,00)	(0,03)
Belanja Sewa	25.874.400,00	24.800.000,00	95,85	(1.074.400,00)	(4,15)
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	222.705.500,00	221.489.500,00	99,45	(1.216.000,00)	(0,55)
Belanja Makan Minum					
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	138.918.124,00	138.589.824,00	99,76	(328.300,00)	(0,24)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS			-	-	-
Belanja perjalanan pindah tugas			-	-	-
Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-	-
Belanja Jasa konsultasi			-	-	-
Belanja Survey dan Penyusunan Design Engineering			-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD			-	-	-
Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa Dana JKN			-	-	-
Uang untuk diberikan kpd masy/pihak ketiga			-	-	-
Belanja jasa narasumber /instruktur/tenaga ahli/pembicara	19.000.000,00	15.500.000,00	81,58	(3.500.000,00)	(18,42)
<b>Jumlah</b>	<b>1.446.937.724,00</b>	<b>1.424.564.591,00</b>	<b>98,45</b>	<b>(22.373.133,00)</b>	<b>(1,55)</b>

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp. 1.424.564.591,- atau 98,45% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 22.373.133,- atau 1,55%.

**b) BELANJA MODAL**

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:



Pemerintah Kabupaten Batang  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

	Tahun 2020		Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Belanja Modal:</b>			
Belanja Tanah	1.025.000.000,00	672.125.496,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	499.830.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	65.150.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
Belanja Aset Lainnya			
	1.040.000.000,00	687.125.496,00	564.980.000,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2020 lebih rendah Rp.687.125.496,- atau 65,57%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi belanja modal Tahun 2020 lebih besar Rp. 122.145.496,- atau 21,62 %.

Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aktiva tetap .

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	<b>1.025.000.000</b>	<b>672.125.496</b>	65,57	<b>352.874.504</b>	34,43
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin :</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	100,00	-	-
Belanja Modal pengadaan alat-alat kantot rumah tangga	15.000.000	15.000.000	100,00	-	-
Belanja Modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan			-	-	-
<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	-	-	-	-	-
<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:</b>					
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan			-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan			-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air			-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota			-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan			-	-	-
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:</b>	-	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan			-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan			-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan			-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya			-	-	-
Jumlah Belanja Modal	1.040.000.000	687.125.496	66,07	352.874.504	33,93



Berikut kami sampaikan penjelasan realisasi masing-masing belanja modal dibandingkan dengan anggarannya sebagai berikut :

- Belanja modal pengadaan tanah tidak terserap sebesar Rp. 352.874.504,00 (33,93%) dikarenakan Penawaran Lelang yang terlalu rendah

## 2. NERACA

Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :

### a. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang terbagi dalam :

<i>Uraian</i>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
1. Aset Lancar	-	544.000,00
2. Investasi Jangka Panjang	-	-
3. Aset Tetap	5.506.557.004,00	3.787.297.035,00
4. Aset Lainnya	-	-
	<u>5.506.557.004,00</u>	<u>3.787.841.035,00</u>

Berdasarkan rincian Aset dalam tabel terlihat bahwa terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang yaitu sebesar Rp. 1.718.715.969,- atau 45,37%.

### 1) ASET LANCAR



Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

<i>Aset Lancar</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1 Kas di Kasda	-	
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
3 Kas di Bendahara Penerimaan	-	
4 Kas di BLUD	-	
5 Kas Lainnya	-	
6 Piutang Pajak Daerah	-	
7 Piutang Retribusi	-	
8 Penyisihan Piutang tak tertagih	-	
9 Belanja Dibayar Dimuka	-	
10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	
11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	
12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	
13 Piutang Lainnya	-	
12 Persediaan	-	544.000,00
	-	<b>544.000,00</b>

**a) Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran berupa uang tunai maupun yang berada di rekening giro bank bendahara pengeluaran SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	31 Desember 2020 (Rp)
a Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah	
b Hutang belanja dan hutang pajak	
<b>Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	-

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

(a) Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah

Sisa Uang Persediaan sebesar Rp. 0,00

(b) Hutang pajak sebesar Rp 0, merupakan pajak yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2020

**b) Kas di Bendahara Penerimaan.**



Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2020 yang belum disetor ke Kas Daerah termasuk pendapatan yang masih berada di pemungut sebesar Rp 0.

Kas di bendahara penerimaan di SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang berupa saldo dari pendapatan

**c) Kas Lainnya**

Kas lainnya sebesar Rp 0 merupakan akun untuk mencatat kas dalam bentuk tunai maupun non tunai (rekening) pada bendahara pengeluaran yang berasal dari hutang belanja sebesar Rp 0 (misal gaji yang belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2020 atau belanja barang yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020), hutang PFK. Berdasarkan data rekening bendahara pengeluaran di sekolah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0

Rincian saldo kas lainnya sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1. Gaji PTT	-	-
2. Pajak	-	-
<b>Jml Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**d) Persediaan**

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

<b>Persediaan</b>	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Persediaan ATK/Pakai Habis	-	544.000,00
2 Persediaan Obat-obatan medis	-	-
3 Persediaan Obat-obatan ternak	-	-
4 Persediaan Rumah tangga	-	-
5 Persediaan Benda Berharga	-	-
6 Persediaan Lainnya	-	-
	<b>-</b>	<b>544.000,00</b>

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname)



terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing SKPD. Nilai persediaan lainnya tersebut termasuk nilai persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, yang sampai tanggal 31 Desember 2020 belum diserahkan kepada masyarakat karena penerima hibah barang belum berbadan hukum.

Berikut penjelasan dari masing-masing persediaan :

(1) Persediaan alat tulis kantor

Persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0 dengan perincian terlampir.

**2) ASET TETAP**

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 ( satu ) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp 8.352.415.097,- merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:

<i>Aset tetap</i>	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Tanah		1.719.485.496,00		1.719.485.496,00
Peralatan dan Mesin	2.354.260.314,00	511.208.571,00	25.000.000,00	2.840.468.885,00
Gedung dan Bangunan	3.113.727.000,00	927.760.000,00	927.760.000,00	3.113.727.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	674.226.595,00			674.226.595,00
Aset tetap lainnya	4.507.121,00			4.507.121,00
pengerjaan				-
	<b>6.146.721.030,00</b>	<b>3.158.454.067,00</b>	<b>952.760.000,00</b>	<b>8.352.415.097,00</b>

Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD.

Penambahan nilai aset terdiri atas :

- (1) penambahan aset dari belanja modal;
- (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN;
- (3) penambahan aset dari hibah;





- (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset;
- (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD;
- (6) penambahan aset dari bukan belanja modal;
- (7) penambahan aset dari pindahan antar rekening; dan
- (8) penambahan aset dari lain-lain.

Pengurangan nilai aset terdiri atas :

- (1) penghapusan aset tetap;
- (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD;
- (3) pengurangan aset karena hibah;
- (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodifikasi;
- (5) pengurangan aset karena rusak berat;
- (6) pengurangan aset karena extracomptable;
- (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam SKPD; dan
- (8) Pengurangan aset karena lain-lain.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**a) Penambahan aset tetap**

- (1) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

<i><b>Uraian</b></i>	<b>Realisasi Belanja Modal 2020 (Rp)</b>
Tanah	672.125.496,00
Peralatan dan Mesin	15.000.000,00
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	<hr/> 687.125.496,00 <hr/>



- (2) Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang dari dana APBD Provinsi/APBN

<i><b>Uraian</b></i>	<i><b>APBD Provinsi /APBN</b></i>
Tanah	
Peralatan dan Mesin	300.000.000,00
Gedung dan Bangunan	200.000.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>500.000.000,00</u>

- (3) Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i><b>Uraian</b></i>	<i><b>Mutasi Antar SKPD</b></i>
Tanah	1.047.360.000,00
Peralatan dan Mesin	171.208.571,00
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>1.218.568.571,00</u>

**b) Pengurangan Aset tetap**

- (1). Pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i><b>Uraian</b></i>	<i><b>mutasi Antar SKPD</b></i>
Tanah	
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	200.000.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>200.000.000,00</u>

**a) Tanah**

Nilai tanah pada umumnya merupakan nilai yang berasal dari penyajian neraca awal ditambah harga perolehan pada tahun berjalan.

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang sebesar Rp 1.719.485.496,- naik sebesar Rp



1.719.485.496,- atau 100 % dari nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 berasal dari Belanja Modal dan Penambahan serta pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Mutasi Penambahan.

Penambahan aset tanah pada tahun 2020 sebesar Rp 1.719.485.496,- terdiri dari :

(a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp 672.125.496,-

(b) Selain dari Belanja Modal sebesar Rp 1.047.360.000,- terdiri dari :

- Mutasi dari SKPD sebesar Rp 1.047.360.000,-

**b) Peralatan dan Mesin**

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.840.468.885,- naik sebesar Rp 486.208.571,- atau 20,65 % dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2019 sebesar Rp 2.354.260.314,-

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin:

<i>Peralatan dan Mesin</i>	<b>Neraca Per 31 Des 2020</b>	<b>Neraca Per 31 Des 2019</b>	<b>Naik (turun)</b>
Alat-alat besar	-	-	-
Alat -alat angkutan	970.728.671,00	799.520.100,00	171.208.571,00
alat-alat bengkel dan alat ukur	263.166.178,00	263.166.178,00	-
alat-alat pertanian dan peternakan	-	-	-
alat-alat kantor dan rumah tangga	1.553.879.336,00	1.231.013.136,00	322.866.200,00
alat-alat studio dan komunikasi	19.014.700,00	26.880.900,00	(7.866.200,00)
alat-alat kedokteran	-	-	-
alat-alat laboratorium	33.680.000,00	33.680.000,00	-
alat-alat keamanan	-	-	-
	<b>2.840.468.885,00</b>	<b>2.354.260.314,00</b>	<b>486.208.571,00</b>

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2020 berasal mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp 486.208.571,- terdiri dari :

(a) Belanja Modal sebesar Rp 15.000.000,-

(b) Selain Belanja Modal sebesar Rp 315.000.000,- berasal dari :



**c) Gedung dan Bangunan**

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.113.727.000,-

**d) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 674.226.595,- tidak ada kenaikan asset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2020.

Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2020 :

<i><b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b></i>	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Jalan dan Jembatan	276.800.874	276.800.874
Bangunan Air	69.366.918	69.366.918
Instalasi dan Jaringan	328.058.803	328.058.803
	<u>674.226.595</u>	<u>674.226.595</u>

Niai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2020 tidak mengalami kenaikan karena tidak ada penambahan asset tetap.

**e) Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan di neraca SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang per 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.507.121,- dibandingkan dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2019 tidak mengalami kenaikan karena tidak ada penambahan asset tetap lainnya.

**f) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersaji di neraca SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,-

**3) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP**



Pemerintah Kabupaten Batang  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2020 dan perbandingannya dengan restatement neraca tahun 2019 sebagai berikut :

	Neraca Per 31 Des 2020	Neraca Per 31 Des 2019 (AUDITED)	Naik (turun)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.845.858.093,00)	(2.359.423.995,00)	(486.434.098,00)
	<b>(2.845.858.093,00)</b>	<b>(2.359.423.995,00)</b>	<b>(486.434.098,00)</b>

#### 4) ASET LAINNYA

Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

SKPD	Neraca Per 31 Des 2020	Neraca Per 31 Des 2019	Naik (turun)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-
Aset tak Berwujud	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset lain-lain	-	-	-
	-	-	-

#### a. KEWAJIBAN

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2020, kewajiban SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang terdiri dari :

Uraian	Neraca Per 31 Des 2020	Neraca Per 31 Des 2019	Naik (turun)
Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	-	-	-

#### 1) .Kewajiban Jangka Pendek

Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh



tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang Tahun 2020 terdiri dari:

<b>Kewajiban Jangka Pendek:</b>	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Hutang Bunga	-	-
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan di terima dimuka	-	-
Hutang Belanja	51.401.218,00	53.828.311,00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	<b>51.401.218,00</b>	<b>53.828.311,00</b>

Penjelasan rincinya sebagai berikut :

a) Hutang Perhitungan Pihak ketiga

Tahun 2020 tidak terdapat hutang kepada pihak ketiga merupakan pungutan pajak kegiatan.

b) Hutang Belanja

Meliputi Utang listrik, telpon dan air bulan Desember 2020 yang baru dibayar bulan Januari 2021 sebesar Rp 688.750,- dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember yang dibayar bulan Januari 2021 sebesar Rp 50.712.468,-

**b. EKUITAS**

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	31 Desember 2020(Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ekuitas	5.455.155.786,00	4.206.680.769,00
	<b>5.455.155.786,00</b>	<b>4.206.680.769,00</b>

**3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

a. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar



kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada tahun 2020 Pendapatan-LO SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang direalisasikan sebesar Rp 500.000.000,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada tahun 2019 sebesar Rp 1.188.657.000,- maka terjadi penurunan sebesar Rp (688.657.000,-) atau 42,06 %.

Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2020 dengan tahun 2019 sebagai berikut :

	Tahun 2020 Realisasi (Rp)	Tahun 2019 Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Pendapatan Asli Daerah	-	0,00	-	-
2 Pendapatan Transfer	-	-	-	-
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	500.000.000,00	1.188.657.000,00	(688.657.000,00)	42,06
	<b>500.000.000,00</b>	<b>1.188.657.000,00</b>	<b>(688.657.000,00)</b>	<b>42,06</b>

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa dari seluruh akun Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi tahun 2019.

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut :

#### 1) **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- 1) pendapatan pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:



Pemerintah Kabupaten Batang  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Pajak Daerah	-	-	-	-
Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah lainnya	-	-	-	-
	-	-	0,00	-

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh pendapatan pajak daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi tahun 2019.

**a) Pendapatan Retribusi Daerah.**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**2) Lain-lain Pendapatan Yang Sah.**

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer meliputi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

Rincian Lain-lain Pendapatan yang sah adalah sebagai berikut :

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah	500.000.000,00	1.188.657.000,00	(688.657.000,00)	42,06
Pendapatan lainnya	-	-	-	-
	500.000.000,00	1.188.657.000,00	(688.657.000,00)	42,06

**a) Pendapatan Hibah**

Rincian Pendapatan Hibah sebagai berikut :

- (1) Hibah dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Peralatan dan Rehab Ruang Pelayan.

**b) Pendapatan Lainnya**

Pada Tahun 2020 tidak ada pendapatan lainnya yang diterima Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang.





## b. BEBAN-LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain.

Selama tahun 2020, beban SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang adalah sebesar Rp 4.594.940.640,- dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp 4.707.638.241,- maka mengalami penurunan sebesar Rp (112.697.601,-) atau 97,61 %. Berikut realisasi beban 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 :

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>1. Beban</b>				
Beban Pegawai	1.953.199.162,00	1.891.269.262,00	61.929.900,00	103,27
Beban Persediaan	185.906.900,00	475.702.425,00	(289.795.525,00)	(39,08)
Beban Jasa	1.880.827.180,00	1.430.699.643,00	450.127.537,00	131,46
Beban Pemeliharaan	124.915.250,00	127.827.300,00	(2.912.050,00)	97,72
Beban Perjalanan Dinas	138.589.824,00	309.471.566,00	(170.881.742,00)	44,78
Beban Penyusutan	311.502.324,00	472.668.045,00	(161.165.721,00)	65,90
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
<b>BLUD</b>	-	-	-	-
	<b>4.594.940.640,00</b>	<b>4.707.638.241,00</b>	<b>(112.697.601,00)</b>	<b>97,61</b>

## g

### 1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk di dalamnya beban pegawai BLUD yang terdapat di BLUD RSUD Kabupaten Batang, BLUD RSUD Limpung dan BLUD Puskesmas se Kabupaten Batang dan beban pegawai BOS.



Beban pegawai di SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.953.199.162,- apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.891.269.262,- mengalami kenaikan sebesar Rp 61.929.900,- atau naik sebesar 103,27 %.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari :

<b><i>Beban Pegawai</i></b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Gaji dan Tunjangan PNS	1.318.330.256,00
Tambahan Penghasilan PNS	634.868.906,00
Belanja Penerimaan Lainnya	
Pimp & Angg DPRD Serta	
Insentif Pemungutan Pajak	
Daerah dan Retribusi Daerah	
Uang Lembur	
Belanja Pegawai BLUD	
belanja pegawai BOS	1.953.199.162,00

## **2. Beban Persediaan**

Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

Beban persediaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 185.906.900,- sedangkan pada tahun 2019 beban persediaan adalah sebesar Rp 475.702.425,- sehingga berkurang sebesar Rp (289.795.525,-) atau 39,08 %.

Beban Persediaan terdiri dari :

<b><i>Beban Persediaan</i></b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Bahan Pakai Habis	87.037.300,00
Bahan Material	53.325.600,00
Cetak dan Penggandaan	
Jasa Konsultasi	
Belanja barang Dana BOS	
Belanja modal yang tidak aset	
Belanja barang & jasa BLUD	
Belanja modal yang menjadi persediaan	
persediaan tahun 2019	544.000,00
persediaan tahun 2020	
hutang belanja tahun 2019	
Belanja brg dan jasa yg diserahkan ke masy	45.000.000,00
	185.906.900,00



### 3. Beban Jasa

Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah.

Beban jasa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.880.827.180,- sedangkan pada tahun 2019 beban jasa adalah sebesar Rp 1.430.699.643,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 450.127.537,- atau naik 31,46 %.

Beban Jasa terdiri dari :

<b><i>Beban Jasa</i></b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Honorarium PNS	44.750.000,00
Honorarium Non PNS	859.970.000,00
Jasa Kantor	667.081.817,00
Premi Asuransi	
Cetak dan Penggandaan	40.225.300,00
Sewa	24.800.000,00
Makan Minum	221.489.500,00
Pakaian dinas	6.600.000,00
Belanja Kursus dan Sosialisasi	
Jasa Konsultasi	
Survey dan Penyusunan Design	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	
Belanja JKN	
Uang yang diberikan ke masyarakat Barang ekstrakomtable menjadi beban	
Barang ekstrakomtable menjadi hibah	
Belanja Jasa Narasumber	15.500.000,00
Belanja Telp, listrik air 2019	(278.187,00)
Belanja Telp, listrik air 2020	688.750,00
	<b>1.880.827.180,00</b>

### 4. Beban Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.

Beban pemeliharaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang tahun 2020 adalah sebesar Rp 124.915.250,- sedangkan pada tahun 2019 beban pemeliharaan adalah sebesar Rp 127.827.300,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp (2.912.050,-) atau berkurang sebesar 2,28 %.

Beban pemeliharaan tahun 2020 dan tahun 2019 terdiri dari :



<b><i>Beban Pemeliharaan</i></b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Perawatan Kendaraan bermotor	91.915.250,00
Belanja barang jasa BLUD	
Belanja barang jasa Dana BOS	
Belanja modal yang menjadi beban	
Pemeliharaan gedung, dll	33.000.000,00
	124.915.250,00

## **5. Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang tahun 2020 adalah sebesar Rp 138.589.824,- sedangkan pada tahun 2019 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp 309.471.566,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp (170.881.742,-) atau turun sebesar 44,78 %.

<b><i>Beban Perjalanan Dinas</i></b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Belanja perjalanan dinas pindah tugas	
Perjalanan Dinas	138.589.824,00
Belanja barang & jasa BLUD	
Belanja barang & jasa BOS	
	138.589.824,00

## **6. Beban Hibah**

Beban hibah adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang tahun 2020 adalah sebesar Rp 0,- sedangkan pada tahun 2019 beban hibah adalah sebesar Rp 0,-



## 7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 311.502.324,- sedangkan pada tahun 2019 beban penyusutan adalah sebesar Rp 472.668.045,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp (161.165.721,-) atau turun sebesar 65,90 %

Beban penyusutan dan amortisasi terinci sebagai berikut :

<i><b>Beban penyusutan dan amortisasi</b></i>	<b>Nominal (Rp)</b>
<b>Beban penyusutan :</b>	
- Peralatan dan mesin	217.315.175,00
- Gedung dan Bangunan	60.008.220,00
- Jalan, irigasi dan jaringan	34.178.929,00
Sub total beban penyusutan	
<b>Beban amortisasi</b>	
- Aset Tak berwujud	
<b>Total beban dan amortisasi</b>	<b>311.502.324,00</b>

## 8. Beban Penyisihan Piutang

Pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang tiada ada Beban penyisihan piutang.

### i. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional Tahun 2020, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp 500.000.000,- dan realisasi beban Rp 4.594.940.640,- maka SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang mengalami surplus/defisit sebesar Rp (4.094.940.640,-) Apabila dibandingkan dengan surplus/defisit tahun 2019 sebesar Rp (3.518.981.241,-) maka terjadi peningkatan sebesar Rp 575.959.399,- atau turun sebesar 116,37%. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

<i><b>Uraian</b></i>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>%</b>
Pendapatan	500.000.000,00	1.188.657.000,00	(688.657.000,00)	42,06
Beban	4.594.940.640,00	4.707.638.241,00	(112.697.601,00)	97,61
<b>Jumlah</b>	<b>(4.094.940.640,00)</b>	<b>(3.518.981.241,00)</b>	<b>(575.959.399,00)</b>	<b>116,37</b>



#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

##### a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang Tahun 2020 adalah sebesar Rp 3.730.289.521,- Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2019.

##### b. Surplus/Defisit –LO

Surplus/Defisit-LO SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang Tahun 2020 adalah sebesar Rp (4.094.940.640,-) yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO

##### c. Koreksi Ekuitas Lainnya.

Koreksi kesalahan mendasar tahun 2020 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas tahun 2020.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp 5.819.806.905,- dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)
1) Koreksi Kas Lainnya	4.972.446.905,00
2) Koreksi Piutang	
3) Koreksi Persediaan	
4) Penambahan aset tetap	1.218.568.571,00
5) Pengurangan aset tetap	(200.000.000,00)
6) Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke dihapuskan	
7) Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke SKPD lain	
8) Perhitungan akumulasi penyusutan AT dari SKPD lain	(171.208.571,00)
9) Perhitungan akumulasi penyusutan AT yang dobel catat	
10) Perhitungan akumulasi penyusutan AT yang kurang catat	
11) Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke Aset Lainnya	
12) Surplus/defisit penjualan aset tetap	
	<u>5.819.806.905,00</u>



Berikut penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2020 sebagai berikut :

**1) Koreksi Kas Lainnya**

Koreksi kas lainnya tahun 2020 sebesar Rp 4.972.446.905,- Merupakan Realisasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang.

**2) Penambahan aset tetap**

Penambahan aset tetap sebesar Rp 1.218.568.571,- terdiri dari :

- a) Penambahan Mutasi dari SKPD lain Rp 1.218.568.571,-
- b) Penambahan aset tetap yang belum Tercatat Rp.....

**3) Pengurangan Aset Tetap**

Pengurangan aset tetap sebesar Rp 200.000.000,- terdiri dari :

<b>Pengurangan Aset Tetap</b>	<b>31 Desember 2020(Rp)</b>
Pengurangan karena penghapusan	
Pengurangan karena Mutasi ke SKPD Lain	(200.000.000,00)
Pengurangan karena Hibah	
Pengurangan karena SK Koreksi	
Pengurangan karena rusak berat	
Pengurangan karena extracountable	
Pengurangan karena pindahan antar rekening	
Pengurangan karena Lain-lain	
<b>Jumlah</b>	<b><u>(200.000.000,00)</u></b>

**4) Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap yang dihapuskan**

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan sebesar Rp 0,- merupakan akumulasi penyusutan asset tetap sampai dengan tahun asset tersebut dihapus.

**5) Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke SKPD Lain**

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap ke SKPD lain sebesar Rp 0,- merupakan total akumulasi penyusutan atas aset tetap yang dimutasikan ke SKPD lain .



**6) Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari SKPD Lain**

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dari SKPD lain sebesar Rp (171.208.571,-) merupakan total akumulasi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh dari SKPD lain.

**7) Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap yang dobel catat**

Koreksi ekuitas yang disebabkan oleh akumulasi penyusutan aset tetap yang dobel catat sebesar Rp 0,-

**8) Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap yang kurang catat**

Koreksi ekuitas yang disebabkan oleh akumulasi penyusutan aset tetap yang dobel catat sebesar Rp 0,-

**9) Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap ke Aset Lainnya**

Koreksi ekuitas yang disebabkan oleh akumulasi penyusutan aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp 0,-

**10) Surplus/Defisit Penjualan Aset Tetap**

**Surplus/deficit penjualan aset tetap sebesar Rp )- merupakan surplus atas penjualan peralatan dan mesin yang dihapuskan.**

**d. Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 5.455.155.786,- dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2019 sebesar Rp 4.206.680.769,- maka mengalami peningkatan sebesar Rp 1.248.475.018,- atau naik sebesar 29,68%.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang dimaksudkan untuk memberikan informasi secara mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang dan posisi keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang per 31 Desember 2020 serta kinerja SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang tahun 2020 pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang.

Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang Tahun 2020. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, Januari 2021

**Kepala SKPD Dinas  
Ketenagakerjaan Kab. Batang**

**SUPRAPTO, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19660925 199710 1 002**